



PEMERINTAH KOTA BATAM

# Perubahan Rencana Kerja Tahun **2022**

**INSPEKTORAT DAERAH  
KOTA BATAM**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 telah selesai disusun.

Dokumen ini dibuat merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang diharuskan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja secara sistematis terarah, terpadu berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026.

Rencana Kerja ini penjabaran dari Renstra Inspektorat Daerah Kota Batam dan RPJMD Kota Batam sesuai dengan Tupoksi yang merupakan sebuah rangkaian kewenangan yang disusun dalam Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Dokumen ini sangat penting bagi Pemerintah Kota Batam yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan Program Kegiatan, proses penyusunan dilakukan secara sistematis disertai dengan kerangka pendanaan, yang indikatif artinya bahwa informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam Dokumen Renstra yang merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat fleksibel.

Akhirnya ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan penyusunan Rencana Kerja. Semoga Allah selalu membimbing dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berkarya sehingga Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam dapat tercapai.

Batam, Agustus 2022

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM,



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19680824 199008 2 001

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	i
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-4
<b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT S.D. TRIWULAN II TAHUN 2021.....</b>	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam...	II-12
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batam.....	II-14
2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-15
<b>BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT.....</b>	III-1
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	IV-1

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Inspektorat Daerah yang bertugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Inspektorat Daerah.

Inspektorat Daerah Kota Batam merupakan institusi pemeriksa internal yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang pengawasan. Pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Batam lebih bersifat pembinaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Batam demi tercapainya visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Untuk mewujudkan fungsi pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintah daerah maka ditetapkan rencana kerja perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022. Rencana kerja adalah bagian dari kerangka Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kota Batam dan merupakan penjabaran lebih lanjut dari rencana strategis untuk 1 (satu) tahun. Rencana Kinerja merupakan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan selama satu tahun anggaran dan menjadi komitmen yang harus dilaksanakan oleh setiap aparatur Inspektorat Daerah Kota Batam dalam upaya mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran strategik yang ditetapkan berisikan indikator pencapaian sasaran dari suatu program dan kebijakan.

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 51 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022 Kota Batam.

12. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah;
13. Peraturan Walikota Kota Batam Nomor 77 Tahun 2021 tentang Susunan dan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam;
14. Peraturan Walikota Batam Nomor 119 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### *a. Maksud*

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan sebagaimana telah ditargetkan dalam perencanaan lima tahunan yang tertuang dalam Renstra Inspektorat Kota Batam.

#### *b. Tujuan*

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perubahan Inspektorat Kota Batam ini adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran tentang kondisi umum, evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Batam di tahun 2022;
2. Memberikan acuan, tolok ukur dan instrumen bagi Inspektorat Daerah Kota Batam dalam pelaksanaan kegiatan tahunan sehingga terarah dan dapat mencapai sasaran dengan hasil maksimal;
3. Memberi arahan keterkaitan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan serta pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan yang dilaksanakan Inspektorat Kota Batam agar sinergis, terpadu dan berkesinambungan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rancangan Renja Perubahan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Inspektorat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Inspektorat Daerah, proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah, keterkaitan antara Renja Inspektorat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Inspektorat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Inspektorat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Inspektorat Daerah.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Daerah.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perubahan Inspektorat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA INSPEKTORAT SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2022**

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Inspektorat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Inspektorat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Inspektorat Daerah mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Inspektorat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Inspektorat Daerah Kota Batam.

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kota Batam.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Inspektorat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

#### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Batam.

Berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah serta capaian program nasional seperti NSPK, SPM dan SGDs (*Sustainable Development Goals*), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.

### **BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

### **BAB V PENUTUP**



**BAB II**  
**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN**  
**RENCANA KERJA INSPEKTORAT S.D. TRIWULAN II**  
**Tahun 2022**

**2.1 Evaluasi Rencana Kerja Inspektorat Triwulan II Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat**

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (*input*), keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan Inspektorat Kota Batam tahun 2021-2026, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja tahun 2022. Adapun program dan kegiatan yang mendukung pencapaian rencana kerja disesuaikan dengan Permendagri nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dimana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sudah ditentukan oleh peraturan ini.

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2022, telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat Kota Batam, dalam APBD Kota Batam tahun 2022 sebesar Rp25.001.463.641 Dengan serapan anggaran sebesar Rp8.419.198.071,00 atau sebesar 33,67%.

Program dan kegiatan serta sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 hingga Semester II ini adalah sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp23.327.889.171.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp7.835.222.425.00.
  - 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp34.500.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp22.298.700.00.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp157.938.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp11.260.000.00
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp124.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp116.856.100.00.
  - 2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp69.708.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp30.513.800.00.
- d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp31.400.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp31.100.000,00
  - 2) Pengadaan Mebel, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp169.410.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp40.500.000,00.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp12.000.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp4.751.740.00.
  - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp36.000.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp11.008.800.00.
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp81.579.680.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp 37.231.006,00
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan sub kegiatan:
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp223.770.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp32.278.500.00.
  - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp17.595.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp17.255.000,00.

## **2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**

### **a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal;**

- 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp47.220.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp14.340.000.00.
- 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp18.030.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp0,00.
- 3) Reviu Laporan Kinerja, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp33.600.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp0.00.
- 4) Reviu Laporan Keuangan, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp37.425.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp33.400.000.00.

- 5) Kerjasama Pengawasan Internal, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp60.925.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 belum ada realisasi anggaran.
  - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp11.330.000,00, realisasi Semester II Tahun 2022 belum ada realisasi anggaran.
- b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu.
- 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah, dengan anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp37.646.500.00, realisasi Semester II sebesar Rp18.776.000,00.
  - 2) Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp29.412.000.00, realisasi anggaran Semester II sebesar Rp13.245.000,00.

### **3. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI.**

a. Pendampingan dan Asistensi.

- 1) Pendampingan, Asistensi, Urusan Pemerintah Daerah, dengan anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp41.100.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp16.700.000,00.
- 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi, dengan anggaran pada APBD Tahun 2022 sebesar Rp26.854.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp14.980.000,00.
- 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp297.077.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 sebesar Rp16.700.000,00.
- 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas, dengan anggaran pada APBD sebesar Rp75.053.000.00, realisasi Semester II Tahun 2022 belum ada realisasi anggaran.

Rekapitulasi Evaluasi terhadap capaian kinerja program dan kegiatan diarahkan terhadap indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari: *input, output dan outcome*. Hasil evaluasi kinerja kegiatan menunjukkan capaian kinerja dari sebagian besar kegiatan .

Pengukuran tingkat capaian kinerja Inspektorat Kota Batam Tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing- masing indikator kinerja sasaran. Tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut disajikan pada tabel berikut :

**Tabel T-C. 29  
REALISASI RENJA INSPEKTORAT TRIWULAN II TAHUN 2022  
KOTA BATAM**

No	Organisasi	Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	IKSK	Realisasi Kinerja T1	Realisasi Kinerja T2	Target Kinerja T2	Target Dana T2
1	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2	0	78	744,884,000
2	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	80	0	78	25,210,162,098
3	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah kegiatan yang ditatausahakan dalam 1 tahun	3	3	12	58,020,000
4	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang dilaksanakan	12	12	12	252,567,000
5	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	0	3	3	204,300,000
6	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di sediakan	0	8	8	124,000,740
7	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Jenis Mebel yang diadakan	0	4	4	187,597,100
8	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	45	45	17,595,000
9	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APUP	0	1	2	11,330,000
10	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	0	1	1	29,412,000
11	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	0	1	1	37,646,500
12	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	0	2	2	297,077,450
13	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Kinerja	0	43	43	33,600,000
14	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	0	0	43	18,030,000
15	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	0	0	43	41,100,000
16	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	12	36,000,000
17	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3	3	12	81,579,680
18	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PERUMUSAN KEBIAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	0	0	43	75,063,100
19	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3	3	12	12,000,000

20	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2	2	8	223,770,000
21	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	0	43	43	37,425,000
22	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	0	43	43	47,220,000
23	INSPEKTORAT	INSPEKTORAT DAERAH	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	0	0	2	60,925,000

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN 2022**

Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan/Pekerjaan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Kegiatan	APBD 2022			P-RKPD 2022		
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	APBD Kota Batam 2022	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu P-RKPD 2022
				<b>25.001.463.641</b> 22.826.260.112			<b>26.391.060.438</b> 20.192.444.832
<b>Inspektorat Daerah</b> Inspektorat Daerah							
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti</b>		<b>87%</b>	<b>275.588.50</b>		<b>87%</b>	<b>271.988.500</b>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal</b>		<b>100%</b>	<b>11.330.000</b>		<b>100%</b>	<b>11.330.000</b>
	<b>2.Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP</b>		<b>100%</b>	<b>197.200.000</b>		<b>100%</b>	<b>197.200.000</b>
<i>Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah</i>	<i>Batam</i>	<i>25 Laporan</i>	<i>47.220.000</i>		<i>43 Laporan</i>	<i>47.220.000</i>
<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>	<i>Batam</i>	<i>44 OPD</i>	<i>19.250.000</i>		<i>43 Laporan</i>	<i>18.030.000</i>
<i>Kerjasama Pengawasan Internal</i>	<i>Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk</i>	<i>Batam</i>	<i>3 Kali</i>	<i>52.000.000</i>		<i>1 kesepakatan</i>	
<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>	<i>Batam</i>	<i>100 %</i>	<i>37.646.500</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>37.646.500</i>
<b>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah</b>		<b>80%</b>	<b>67.058.500</b>		<b>80%</b>	<b>63.458.500</b>
<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	<i>Persentase Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>	<i>Batam</i>	<i>50 Persen</i>	<i>37.646.500</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>34.046.500</i>



Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Batam	2 Kali	29.412.000	Batam	1 Laporan	29.412.000
<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPiP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>	Batam	100%	440.084.550	Batam	100%	400.781.450
Kegiatan Pendampingan dan Asistensi	Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi		100%	440.084.550		100%	400.781.450
Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Batam	44 SKPD	41.100.000	Batam	43 Perangkat Daerah	41.100.000
Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Batam	44 SKPD	26.854.000	Batam	43 Perangkat Daerah	26.854.000
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Batam	44 SKPD	297.077.450	Batam	2 Kegiatan	297.077.450
Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Batam	44 SKPD	75.053.100	Batam	43 Perangkat Daerah	35.750.000
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>		100%	24.285.790.591		100%	25.718.290.488
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>		100%	23.362.389.171		100%	24.818.368.068
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Batam	68 orang	23.327.889.171		79 orang/bulan	24.765.868.068
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Batam	9 Kegiatan	34.500.000		12 dokumen	52.500.000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>		100%	157.938.000		100%	138.138.000

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Batam	78 Pegawai	157.938.000	157.938.000	79 orang	138.138.000
<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>193.708.740107.</b>	<b>193.708.740107.</b>	<b>100%</b>	<b>190.029.740</b>
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batam	0	0	0	0	0
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	3 jenis	124.000.740	124.000.740	8 paket	124.000.740
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Batam	3 jenis	108.950.000	108.950.000	0 paket	0
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batam	0 paket	0 paket	0 paket		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Batam	0 paket	0	0	0 paket	0
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar daerah	60 kali	69.708.000	69.708.000	12 laporan	66.029.000
<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100%</b>	<b>200.810.000</b>	<b>200.810.000</b>	<b>100%</b>	<b>200.810.000</b>
Pengadaan Mebel	Batam	4 Jenis	169.140.000	169.140.000	2 Paket	169.140.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batam	4 Jenis	31.400.000	31.400.000	2 Unit	31.400.000
<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Batam</b>	<b>100%</b>	<b>129.579.680</b>	<b>129.579.680</b>	<b>100%</b>	<b>129.579.680</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Batam	1 jenis	12.000.000	12.000.000	12 laporan	12.000.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Batam	1 jenis	36.000.000	36.000.000	12 laporan	36.000.000

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan.	Batam	2 orang	81.579.680	Batam	12 laporan	81.579.680
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana		100%	241.365.000		100%	241.365.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Batam	8 Unit	223.770.000		8 Unit	223.770.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		45 Unit	17.595.000		45 Unit	17.595.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Batam	1 Unit	0		0 unit	0
	<b>Jumlah</b>			25.001.463.641			26.391.060.438

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kota Batam

Inspektorat Daerah Kota Batam adalah Aprata Pengawas Intern Pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan dan pembinaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Inspektorat Kota Batam pada RPJMD Kota Batam 2021-2026 mengemban misi ke-5 Walikota Batam yaitu **“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, efektif dan efisien berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat”**. Untuk mencapai misi tersebut, Inspektorat Kota Batam mempunyai tujuan Meningkatkan peran Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas dengan indikator tujuan adalah tingkat maturitas SPIP. Sasarannya adalah :

- a. Meningkatnya Pengawasan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja sasaran yaitu :
  - persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat.
  - Nilai Kapabilitas APIP.
- b. Meningkatnya Kelembagaan SKPD dalam Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas, dengan indicator sasaran yaitu :
  - Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi.
  - Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B.

**Tabel T-C.30**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Indikator	SPM/Standar Maksimal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	Persentase SKPD dengan SAKIP mencapai nilai BB dari Hasil Evaluasi Inspektorat			57%	68%	57%	68%	
2	Nilai Kapabilitas APIP			Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	
3	Persentase Capaian Aksi Pencegahan Korupsi			81%	82%	81%	82%	
4	Persentase SKPD yang Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi (PMPRB) mendapat nilai B			75%	80%	75%	80%	

### 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu strategis sebagai permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang diidentifikasi dari berbagai sumber diantaranya :

1. Belum optimalnya tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh SKPD;
2. Masih adanya SKPD yang terkena kasus hukum;
3. Belum optimalnya penerapan SPIP di jajaran SKPD;
4. Belum optimalnya impelmentasi SAKIP di SKPD.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka isu strategis yang diangkat adalah :

1. Inspektorat tidak hanya menjadi pengawas intern tetapi juga sebagai *quality assurance* bagi SKPD - SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam. Dalam menjalankan fungsi sebagai *quality assurance* terdapat beberapa kegiatan berupa :
  - a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
  - b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada SKPD;
  - c. Reviu LKPD secara berkelanjutan;
  - d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis risiko;
  - e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaat barang/jasa (*probity audit*).
2. Memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian menjadi suatu yang harus diupayakan dalam opini laporan keuangan Pemerintah Kota Batam.
3. Manajemen Risiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan yang langsung memiliki dampak risiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.
4. Percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawas internal maupun eksternal.
5. Peningkatan Predikat akuntabilitas kinerja pemerintah Kota Batam. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan maupun dari penilaian yang diberikan oleh Kemenpan selaku pembina

kinerja pemerintahan. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

6. Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, isu ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas.
7. Zona integritas harus dibangun untuk menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani (WBBM) melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan upaya peningkatan pelayanan publik.

#### 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah.

Usulan program dan kegiatan tersebut diperoleh berdasarkan masih banyaknya pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik yang dilaksanakan oleh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

Namun untuk Tahun Anggaran 2022, tidak ada program dan kegiatan yang berdasarkan usulan dari masyarakat, program dan kegiatan diusulkan dalam rangka memenuhi amanah Permendagri No.6 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan SPM.

**Tabel T-C.32**

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 Kota Batam**

Nama Perangkat Daerah : Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
			n i h i i		

**BAB III**

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT  
DAERAH KOTA BATAM**

Rincian kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Inspektorat Daerah Kota Batam tahun 2022 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana Perubahan APBD Kota Batam adalah sebagai berikut:



Kode					Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target 2022	Pagu	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
											Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif
6					Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan										
6	01				<b>Inspektorat Daerah</b>			<b>25,598,186,704</b>							<b>25,001,463,641</b>
6	01	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>100%</b>	<b>24,961,166,754.00</b>						<b>100%</b>	<b>24,285,790,591</b>
6	01	01	202		<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi</b>	<b>100%</b>	<b>24,070,268,334</b>						<b>100%</b>	<b>23,362,389,171</b>
6	01	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	79 orang/bulan	24,017,768,334	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			ASN Inspektorat	79 orang/bulan	23,327,889,171
6	01	01	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	52,500,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			ASN Inspektorat	12 Dokumen	34,500,000
6	01	01	205		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>129,294,000</b>	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					<b>100%</b>	<b>157,938,000</b>
6	01	01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	79 orang	129,294,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			ASN Inspektorat	79 orang	157,938,000
6	01	01	206		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>189,849,740</b>						<b>100%</b>	<b>193,708,740</b>
6	01	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	0 Paket	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			ASN Inspektorat	0 Paket	0
6	01	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	124,000,740	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			ASN Inspektorat	8 Paket	124,000,740

6	01	01	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	0 Paket		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	0 Paket	
6	01	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	0 Paket	
6	01	01	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket	0	#REF!	APBD		ASN Inspektorat	0 Paket	
6	01	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	65,849,000.00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	12 Laporan	69,708,000
6	01	01	207		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>200,810,000</b>					<b>100%</b>	<b>200,810,000</b>
6	01	01	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket	169,410,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	2 Paket	169,410,000
6	01	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	31,400,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	2 Unit	31,400,000
6	01	01	208		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>129,579,680</b>					<b>100%</b>	<b>129,579,680</b>
6	01	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	12 Laporan	12,000,000

6	01	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36,000,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	12 Laporan	36,000,000
6	01	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	81,579,680	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	12 Laporan	81,579,680
6	01	01	209		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana</b>	<b>100%</b>	<b>241,365,000</b>					<b>100%</b>	<b>241,365,000</b>
6	01	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	223,770,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	8 Unit	223,770,000
6	01	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	45 Unit	17,595,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	45 Unit	17,595,000
6	01	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		ASN Inspektorat	0 Unit	0
6	01	02			<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>Persentase Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal yang selesai ditindaklanjuti</b>	<b>87%</b>	<b>271,988,500</b>						<b>275,588,500.0</b>
6	01	02	201		<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>1.Persentase SKPD yang menindak lanjuti Rekomendasi temuan pemeriksaan internal dan eksternal</b>	<b>100%</b>	<b>11,330,000</b>					<b>100%</b>	<b>11,330,000.0</b>
						<b>2.Persentase Pemenuhan Area Proses Kunci Kapabilitas APIP</b>	<b>100%</b>	<b>197,200,000</b>					<b>100%</b>	<b>197,200,000</b>
6	01	02	201	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	43 Laporan	47,220,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD		OPD	43 Laporan	47,220,000

								<i>43 Laporan</i>	<i>35,340,000</i>	<i>Kota Batam</i>									
6	01	02	201	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	43 Laporan	18,030,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Laporan	18,030,000				
					<i>Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>		<i>43 Laporan</i>	<i>18,030,000</i>	<i>Kota Batam</i>										
6	01	02	201	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	43 Laporan	33,600,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Laporan	33,600,000				
					<i>Reviu laporan SAKIP</i>		<i>43 Laporan</i>	<i>22,800,000</i>	<i>Kota Batam</i>										
6	01	02	201	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	43 Laporan	37,425,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Laporan	37,425,000				
					<i>Reviu laporan keuangan Pemko dan OPD</i>		<i>43 Laporan</i>	<i>35,100,000</i>	<i>Kota Batam</i>										
6	01	02	201	06	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan	60,925,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	1 Kesepakatan	60,925,000				
					<i>Pelaksanaan Probity Audit</i>		<i>1 Kesepakatan</i>	<i>18,850,000</i>	<i>Kota Batam</i>										
6	01	02	201	07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen	11,330,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	2 Dokumen	11,330,000				
					<i>Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i>		<i>2 Dokumen</i>	<i>10,700,000</i>	<i>Kota Batam</i>										
6	01	02	202		<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Persentase SKPD yang tidak terdapat temuan kerugian Negara/Daerah</b>	<b>80%</b>	<b>63,458,500</b>						<b>84%</b>	<b>67,058,500.0</b>				

6	01	02	202	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	34,046,500	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	1 Laporan	37,646,500.0
					<i>Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>34,046,500</i>	<i>Kota Batam</i>						
6	01	02	202	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	1 Laporan	29,412,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	1 Laporan	29,412,000.0
					<i>Pemeriksaan dengan tujuan khusus</i>		<i>1 Laporan</i>	<i>27,900,000</i>	<i>Kota Batam</i>						
6	01	03			<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>Persentase SKPD yang mengimplementasikan SPIP, Reformasi Birokrasi dan Penegakan Integritas</b>	<b>100%</b>	<b>365,031,450</b>						<b>100%</b>	<b>440,084,550</b>
6	01	03	2.02		<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Persentase SKPD yang telah menindaklanjuti hasil pendampingan dan asistensi</b>	<b>100%</b>	<b>365,031,450</b>						<b>100%</b>	<b>440,084,550</b>
6	01	03	202	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	43 Perangkat Daerah	41,100,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Perangkat Daerah	41,100,000
					<i>Monitoring dan evaluasi SPIP</i>		<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>34,800,000</i>	<i>Kota Batam</i>						
6	01	03	202	2	Pendampingan Asistensi Verifikasi dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	43 Perangkat Daerah	26,854,000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Perangkat Daerah	26,854,000
					<i>Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kota dan OPD</i>		<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>26,854,000</i>	<i>Kota Batam</i>						
6	01	03	202	3	Koordinasi Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2 Kegiatan	297,077,450	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD			OPD	43 Perangkat Daerah	297,077,450
					<i>Penyelenggaraan Korsupgah KPK dan Saber Pungli</i>		<i>2 Kegiatan</i>	<i>289,575,000</i>	<i>Kota Batam</i>						

6	01	03	202	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	43 Perangkat Daerah	0	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	APBD				43 Perangkat Daerah	75,053,100
					<i>Penilaian Penegakan Intergritas oleh KPK</i>		<i>43 Perangkat Daerah</i>	<i>35,750,000</i>	<i>Kota Batam</i>						

#### **4.1 Catatan Penting yang perlu Mendapat Perhatian**

Dalam pencapaian keberhasilan untuk mewujudkan visi "*Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat*" melalui pelaksanaan program dan kegiatan maka perlu adanya komitmen, semangat, kemauan dan tekad bersama agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

#### **4.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan**

Penyusunan serta penetapan program dan kegiatan dalam Perubahan Rancangan Renja 2022 untuk mencapai target pembangunan yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra, Perubahan Rancangan Renja Tahunan Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 disusun sebagai wujud dukungan kepada Pemerintah Kota Batam di bidang pengawasan akan mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap aspirasi rakyat dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

#### **4.3 Rencana Tindak Lanjut**

Dokumen perencanaan ini diharapkan dapat memberikan arah dalam melakukan Perencanaan Pembangunan dimasa yang akan datang, dan dengan ditetapkannya Perubahan Rancangan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 ini diharapkan kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kota Batam dapat berjalan dengan baik.

Demikian Renja Inspektorat Daerah Kota Batam Tahun 2022 ini dibuat, semoga dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Batam, Agustus 2022  
INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM,



HENDRIANA GUSTINI, S.Sos.  
Pembina Utama Muda,  
NIP. 19680824 199008 2001